

PELUANG PENGGUNAAN PARADIGMA PENDIDIKAN KRITIS DALAM KAJIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

M. Ardi Kurniawan

Universitas Ahmad Dahlan
ardiy_kurniawan@yahoo.co.id

Abstract

Critical educational paradigm is one paradigm that is rarely used in the study of education in Indonesia. Therefore, studies with this kind of paradigm becomes necessary. Through the paradigm of critical education, intervention practices of power on the education system of a country can be described. One way is through the revelation of the hidden curriculum. This disclosure may be done through an assessment of the text contained in the textbook, especially language and literature. The purpose of disclosure is to see what kind of ideology behind an education system of a country in a given period of time as well as explaining that education is not a neutral space of the interests of various groups in the community.

PENGANTAR

Dalam kajian pendidikan mutakhir terdapat tiga paradigma pendidikan yang kerap dipakai untuk melihat sistem pendidikan. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma pendidikan konservatif, liberal, dan kritis. Dari ketiga paradigma ini, paradigma pendidikan kritis merupakan paradigma yang jarang digunakan dalam kajian pendidikan di Indonesia (Suharto, 2012:276; Hasan, 2011:159; Wahyono,2012:7).

Minimnya kajian pendidikan di Indonesia dengan paradigma pendidikan kritis dimungkinkan oleh tiga hal sebagai berikut. Pertama, paradigma pendidikan kritis belum lama muncul. Paradigma ini pertama kali dicetuskan Paulo Freire di Brazil pada 1960-an. Kedua, paradigma pendidikan konservatif dan liberal lebih banyak digunakan di Indonesia (Soeharto, 2010:145). Hal ini membuat wacana pendidikan kritis terpinggirkan dari arus utama kajian pendidikan. Ketiga, minimnya literatur yang memperbincangkan paradigma pendidikan kritis (Hidayat,2013:xvii).

Selain ketiga hal tersebut, selama ini berbagai perbincangan yang ada mengenai pendidikan kritis pun terbatas dilakukan oleh mereka yang berminat dan mendalami kajian pendidikan kritis. Hal ini membuat wacana pendidikan kritis semakin terpinggirkan di luar arus utama kajian pendidikan.

Situasi yang demikian tentu mendorong perlu dilakukannya kajian pendidikan dengan paradigma pendidikan kritis. Selain bertujuan menambah literatur yang memperbincangkan tentang pendidikan kritis, kajian dengan paradigma pendidikan kritis juga memberi peluang melihat sejumlah persoalan dalam ranah pendidikan di Indonesia melalui perspektif lain.

Sebagai upaya pembatasan masalah, dalam uraian di bawah ini akan disampaikan peluang kajian pendidikan melalui paradigma pendidikan kritis dalam ranah pendidikan bahasa dan sastra.

PENDIDIKAN KRITIS

Untuk memahami paradigma pendidikan kritis, perlu disampaikan terlebih dahulu perbandingannya dengan paradigma pendidikan konservatif dan liberal. Dalam buku bertajuk *Pendidikan Populer* (2000:12-14) yang disunting Mansour Fakhri, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, terdapat sejumlah uraian mengenai ketiga paradigma tersebut sebagai berikut.

Pendidikan konservatif merupakan paradigma pendidikan yang memiliki pandangan bahwa ketidakkesederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir tuhan. Pendidikan konservatif cenderung lebih menyalahkan subyeknya. Menurut pendidikan ini, mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Pandangan semacam ini muncul karena banyak orang lain yang ternyata bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karena itu tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Paradigma ini menekankan pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan konflik dan kontradiksi.

Berbeda dengan pendidikan konservatif, pendidikan liberal merupakan paradigma yang berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu, tugas pendidikan juga tidak ada hubungannya dengan persoalan politik dan ekonomi.

Meski memiliki perbedaan, paradigma pendidikan konservatif dan liberal memiliki persamaan pandangan bahwa persoalan pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. Ini yang membedakan pendidikan kritis dengan pendidikan liberal dan konservatif. Dalam pendidikan kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga *status quo*, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat tempat pendidikan berada. Bagi paradigma ini, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat terlihat pula dalam dunia pendidikan. Paham ini bertentangan dengan pandangan kaum liberal yang menganggap pendidikan terlepas dari persoalan kelas dan gender yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pendidikan kritis, tujuan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap obyektif maupun berjarak dengan masyarakat. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan tertindas untuk mencipta sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam pendidikan kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis demi terjadinya transformasi sosial.

Dari uraian mengenai ketiga paradigma pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kritis memandang pendidikan pada dasarnya tidak lepas dari kepentingan politik untuk melanggengkan sistem sosial, ekonomi, atau kekuasaan yang ada. Ini menegaskan apa yang disampaikan Michael W. Apple (2004:8), John Storey (1996:6), dan Monica McLean (2006:1) bahwa pendidikan bukan ruang yang netral, bebas nilai, dan bebas dari intervensi kekuasaan serta politik. Dalam konteks kajian pendidikan, Michael W. Apple (2004: vii-viii) menekankan pendidikan kritis tidak sekadar bertautan dengan persoalan teknis pendidikan, melainkan melihat hubungan sistem pendidikan dengan ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki relasi kuasa. Hal ini karena sistem pendidikan merupakan elemen utama dalam memelihara relasi dominasi dan eksploitasi dalam

masyarakat. Dengan demikian, melalui perspektif pendidikan kritis, dapat ditelusuri unsur-unsur kepentingan dalam sebuah sistem pendidikan.

INTERVENSI DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan kritis memandang bahwa pendidikan bukan ruang yang netral. Oleh sebab itu, dalam suatu sistem pendidikan terdapat kemungkinan intervensi berbagai kepentingan. Melalui buku bertajuk *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies* (1981) William F. O'Neill pernah menjelaskan praktik pendidikan di Amerika Serikat yang penuh dengan kepentingan politik dan ideologi.

Kajian yang dilakukan O'Neill ini mengafirmasi temuan yang disampaikan Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam *Schooling in Capitalist* (1976). Melalui analisis politik ekonomi terhadap pendidikan, Bowles dan Gintis menyimpulkan bahwa pendidikan di Amerika banyak dipengaruhi kebutuhan kelas yang berkuasa dan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka.

Praktik-praktik semacam itu sebenarnya juga terlihat dalam sistem pendidikan di Indonesia. H.A.R. Tilaar (2003:65-91) menyampaikan bahwa intervensi kekuasaan dan kekuatan dominan ke dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah berlaku sejak masa kolonial. Lebih lanjut diuraikan bahwa pada masa penjajahan, pendidikan digunakan sebagai alat penguasa untuk meredam keinginan dari bangsa terjajah. Sistem pendidikan kolonial merupakan alat dari kekuasaan kolonial untuk meredam nasionalisme. Apabila di negara bekas jajahan diselenggarakan pendidikan, maka pendidikan itu terbatas untuk segolongan anggota masyarakat yang dianggap oleh pemerintah kolonial dapat membantu cita-citanya di negara koloni. Dengan kata lain, dalam praktik pendidikan kolonial, peserta didik dieksploitasi oleh kekuasaan di luar pendidikan. Tujuan praktik pendidikan kolonial pada dasarnya adalah menghasilkan peserta didik sebagai pegawai untuk mencapai tujuan eksploitasi penjajah terhadap jajahannya.

Dalam sejarah Indonesia, praktik pendidikan yang diintervensi kekuasaan terjadi sejak Belanda menjalankan kebijakan politik etis di Indonesia. Politik etis adalah kebijakan yang diambil Ratu Wilhelmina setelah mendapat laporan tentang kesejahteraan penduduk di Jawa. Carl Hallencreutz (1966:30) menjelaskan bahwa kebijakan ini juga diambil setelah pada 1899 C. Th. van Deventer menulis kritik bertajuk *Een Eereschuld* (Hutang Kehormatan) di majalah *De Gids*. Dalam tulisannya tersebut, van Deventer menjelaskan bahwa orang Indonesia berjasa terhadap bangsa Belanda dalam pemulihan perekonomian negeri Belanda. Untuk semua itu, sudah sewajarnya jika kebaikan budi dibayarkan kembali. Menurut van Deventer, hutang budi tersebut harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia

Kebijakan politik etis pertama kali disampaikan pada pidato pembukaan parlemen Belanda 1901. Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program *Trias van Deventer* yang meliputi irigasi, migrasi, dan edukasi. Irigasi dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Migrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Sementara edukasi berarti menyelenggarakan pendidikan di tanah jajahan. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi serta menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda (Nagazumi, 1989 :27- 28).

Meski salah satu kebijakan politik etis adalah memberi pendidikan bagi kaum koloni, hal ini sebenarnya merupakan dalih untuk mempertahankan kekuasaan di tanah jajahan (Gibson, 2005:6). Hal ini ditegaskan oleh Sarwadi (2004:8) yang menyampaikan bahwa maksud pemerintah Belanda membuka sekolah pada akhir abad 19 adalah mendidik pegawai rendah yang dibutuhkan oleh pemerintah. Hal senada juga dituturkan K. St. Pamuntjak (1948:5-6) dalam buku *Balai Pustaka Sewadjarnya* yang menyatakan bahwa awal mula pendirian sekolah di Jawa bukanlah karena hendak memberi pengajaran kepada rakyat, melainkan memenuhi kebutuhan pemerintah terkait pegawai negeri. Dengan kata lain, pendirian sekolah semata-mata demi mempersiapkan tenaga pegawai pemerintahan kolonial.

Sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan kolonial semakin terlihat saat Belanda memberlakukan biaya sekolah yang mahal. Hal ini membuat warga pribumi kesulitan menempuh pendidikan. Hanya mereka yang berasal dari kalangan atas yang mendapat kesempatan bersekolah.

Untuk melanggengkan kekuasaan melalui sistem pendidikan, Belanda berupaya menyediakan bahan bacaan bagi siswanya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Belanda mendirikan badan penerbit bernama Balai Pustaka. Pendirian Balai Pustaka pada 1917 sendiri bermula dari keinginan pemerintah kolonial mengontrol buku-buku yang terbit di Hindia Belanda. Dalam buku *Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia*, Maman S. Mahayana (2007:119) menegaskan bahwa pendirian Balai Pustaka dan tugas yang diembannya didasarkan pada usaha menjalankan kebijakan pemerintah kolonial di bidang pendidikan. Oleh karena itu, buku yang diterbitkan Balai Pustaka harus sejalan dengan kebijakan politik pemerintah kolonial dan memberi legitimasi kekuasaan Belanda di tanah jajahan

Kebijakan ini dapat berjalan dengan baik karena didukung subsidi pemerintah kolonial. Subsidi ini membuat harga jual buku semakin murah. Selain itu, buku dapat didistribusikan secara luas hingga ke wilayah pedesaan karena Balai Pustaka memiliki jaringan distribusi yang luas dan terkendali melalui perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah, dan insitusi pemerintah lain seperti stasiun kereta api dan kantor pemerintah (Faruk, 2001:53).

Pada masa Indonesia merdeka, praktik intervensi kekuasaan terhadap sistem pendidikan masih berlanjut. Dalam penelitian bertajuk *Dinamika Pendidikan pada Masa Orde Baru* yang ditulis Sardiman dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri disampaikan bahwa semenjak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan tidak pernah terlepas dari intervensi dan politisasi (2012:3-4). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pada 1964, kurikulum dijadikan sarana legitimasi kebijakan politik penguasa, yang berujung pada pembenaran-pembenaran sepihak terhadap teori kepemimpinan yang diterapkannya.

Praktik ini terlihat semakin jelas saat Orde Baru berkuasa. Pada periode tersebut proses pendidikan, kurikulum, dan metodologi pendidikan digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Hal ini bisa terlihat dalam mata pelajaran PSBP (Perjuangan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang berisi sejarah militer dan legitimasi kekuasaan pada masa Orde Baru.

Hal ini ditegaskan Muhidin M. Dahlan (2014:8) bahwa untuk melegitimasi kekuasaannya, Soeharto terus-menerus memproduksi kutipan dari kesatria-kesatria jebolan Revolusi 1945 dan mereka yang berjasa dalam penjatuhan Sukarno dan pengganyangan PKI dalam bentuk film, pidato, monumen, diorama, museum, cerita, dan kurikulum pendidikan.

Selain mempertahankan kekuasaan, pemerintah Orde Baru juga menggunakan pendidikan untuk mengkampanyekan ideologi modernisme. Nurhady Sirimorok (2008:102) dalam buku bertajuk *Laskar Pemimpi* menyampaikan bahwa guru, sekolah, dan buku ajar digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengkampanyekan modernisme dengan sistematis.

Lebih lanjut diuraikan Sirimorok (2008:28) bahwa ideologi modernisme sebenarnya sudah masuk dalam sistem pendidikan secara menyeluruh dan sistematis sejak masa kolonial. Pendidikan Indonesia yang berakar dari Eropa masa kolonial ini kemudian diadopsi nyaris mentah-mentah oleh penyelenggara pendidikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pendidikan masa kolonial adalah pembelajaran untuk menghasilkan tenaga terampil yang patuh dan apolitis. Secara umum, pemerintahan kolonial membutuhkan tenaga administratif, dokter, dan insinyur. Semua untuk melancarkan jalannya pemerintahan kolonial serta eksploitasi terhadap alam dan tenaga kerja pribumi.

Praktik pendidikan lain yang juga mengandung kepentingan pihak tertentu pada masa Orde Baru adalah sistem pendidikan sentralistik. Sistem ini dianggap mengutamakan sekelompok pihak di Jakarta dan bukan kebutuhan rakyat banyak. Sistem ini membuat standar pendidikan di kota besar seperti Jakarta berlaku pula untuk semua daerah di Indonesia.

H.A.R. Tilaar (2003:229-230) mengungkapkan bahwa sistem pendidikan yang sentralistik tidak memberikan peluang kepada pemerintah di daerah untuk melaksanakan pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Sistem pendidikan sentralistik ini ditopang oleh berbagai sistem dalam pelaksanaannya, seperti kurikulum nasional yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada otonomi lembaga atau daerah untuk menentukan standarnya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah. Dengan sistem yang kaku, statis, dan manajemen terpusat membuat minimnya ruang gerak bagi pengambilan keputusan di tingkat sekolah, kabupaten, atau provinsi.

Sistem pendidikan semacam ini membuat materi pembelajaran yang diajarkan dan diujikan di Jakarta sama dengan yang ada di Kalimantan maupun Papua. Padahal, antara Jakarta, Kalimantan, dan Papua memiliki sejumlah persoalan pendidikan yang berbeda-beda.

Praktik pendidikan lain yang memiliki potensi intervensi pihak tertentu adalah kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Kebijakan RSBI yang kini telah dihentikan tersebut pada awalnya adalah bagian dari upaya meningkatkan mutu lulusan agar memiliki daya saing pada taraf internasional. (Depdiknas, 2009:6,). Akan tetapi, oleh sejumlah pihak, keberadaan RSBI dianggap dapat membawa ketidakadilan di ranah pendidikan.

N.B. Atmadja (2010: 3-4) menyampaikan bahwa RSBI memiliki kemungkinan mengandung penindasan, ketidakadilan, atau peminggiran yang dilakukan oleh kelas sosial atas terhadap kelas bawah atau kelas kaya terhadap kelas miskin. Peminggiran itu tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang melandasinya. Ideologi tidak saja dianut oleh negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil, namun bisa pula menjalar ke sekolah-sekolah bagian dari negara sebagai struktur dominan. Hal ini yang membuat RSBI selalu mengundang perdebatan di ranah pendidikan. Pada akhirnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, kebijakan RSBI dihentikan.

Dari berbagai uraian di atas, ditunjukkan bahwa praktik pendidikan di Indonesia pada masa kolonial hingga Orde Baru sarat berbagai intervensi kepentingan. Hal ini hanya dapat diketahui apabila pendidikan kritis digunakan sebagai paradigma. Oleh karena itu, untuk melakukan kajian

dalam sistem pendidikan Indonesia mutakhir, paradigma pendidikan kritis mutlak diperlukan untuk melihat intervensi berbagai kepentingan yang ada.

HIDDEN CURRICULUM DALAM TEKS BUKU AJAR

Uraian mengenai sejumlah praktik intervensi kepentingan dalam sejarah sistem pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia kerap digunakan dan dikorbankan untuk suatu kepentingan. Praktik intervensi kepentingan semacam ini biasanya secara tidak disadari masuk ke dalam sistem pendidikan melalui *hidden curriculum* (Tilaar:145). Penyingkapan *hidden curriculum* hanya dimungkinkan apabila kajian pendidikan melakukan analisis ideologi dan hegemoni yang terkandung di dalam sebuah kurikulum.

Salah satu cara untuk melihat *hidden curriculum* dalam suatu sistem pendidikan adalah melakukan kajian terhadap teks bahan ajar bahasa dan sastra. Melalui tulisan bertajuk *Sastra Anak dan Restu Negara*, Citraningtyas (2009:22) menuturkan bahwa teks yang dipilih untuk dimuat dalam buku ajar merupakan representasi kepentingan ideologi suatu sistem pemerintahan. Dengan kata lain, terdapat intervensi negara dalam pemilihan teks untuk dimuat dalam buku ajar. Melalui paradigma semacam ini, dapat diketahui ideologi seperti apa yang menyusup dalam teks bahan ajar. Ideologi ini tentu bukan sekadar ideologi resmi yang dikehendaki negara, melainkan juga ideologi ekonomi, politik, dan budaya yang berpeluang menyusup dalam kurikulum resmi.

Kajian dengan model semacam ini tidak bertujuan untuk membersihkan teks bahan ajar dari beragam ideologi yang ada, melainkan memberi penjelasan mengapa ideologi-ideologi tertentu dapat menyusup ke dalam kurikulum.

PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan ruang yang netral dari intervensi kepentingan. Oleh sebab itu, dalam suatu sistem pendidikan yang tengah berjalan perlu dilakukan kajian mengenai intervensi beragam kepentingan yang masuk melalui *hidden curriculum*. Salah satu cara untuk menyingkap *hidden curriculum* adalah memeriksa teks buku ajar. Hal ini karena teks yang dimuat dalam buku ajar merupakan representasi ideologi negara pada periode waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, Michael W. (2004). *Ideology and Curriculum*. New York: Routledge Falmer.
- Atmadja, N.B. (2010). Sekolah (Rintisan) Bertaraf Internasional sebagai Arena Sosial Melanggengkan Ketidakadilan bagi Kaum Miskin (Perspektif Teori Kritis). *Jurnal Media Komunikasi FIS, Edisi Khusus Pendidikan Ekonomi Vol.9, No 1, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dahlan, Muhidin M. (2014, 2 Juli). Politik Kutipan. *Koran Tempo*. dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2014/07/02/1465/Politik-Kutipan>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Gibson, Thomas. (2005). *And the Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*. Honolulu: University Of Hawai'i Press.

- H.T., Faruk. (2001). *Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Haryanto. (2010). *Pengembangan Kesadaran Kritis dalam Pembelajaran untuk Mewujudkan Pemimpin Visioner*. Makalah disajikan dalam ICEMAL 30 April – 2 Mei 2010, di Fakultas Ilmu Sosial, UNY.
- Hallencreutz, Carl F. (1966.) *Kramer towards Tambaram. A Study in Hendrik Kramer's Missionary Approach*. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
- Hasan, Yusuf A. (2011). Pandangan Giroux Tentang Pedagogi Kritis, dan Relevansinya Bagi Ilmu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna UMY Vol.7 No. 2 Juli - Desember 2011*.
- Hidayat, Rakhmat. (2013). *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahayana, Maman S. (2007). *Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- McLean, Monica. (2006). *Pedagogy and the University: Critical Theory and Practice* London: Continuum.
- Nagazumi, Akira. (1972). *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*. Tokyo: Institute of Developing Economies.
- Pamuntjak, K. St. (1948). *Balai Pustaka Sewadjarnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sardiman, A.M. dan Rhoma Dwi Arya Yuliantri. (2012). *Dinamika Pendidikan pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daed Joesoef dan Nugroho Notosusanto)*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Sarifudin, Didin. (2008). *Pembangunan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Makalah disajikan dalam *International Seminar on Lifelong Education (ISLE)*, 22-23 Agustus 2008, di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sarwadi. (2004). *Sejarah Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sirimorok, Nurhady. 2008. *Laskar Pemimpi: Andrea Hirata, Pembacanya dan Modernisasi Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Storey, John. (1996). *What is Cultural Studies? A Reader*. London: Arnold.
- Suharto, Toto. (2012). *Pendidikan Kritis dalam Perspektif Epistemologis Islam: Kajian Atas Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Kritis*. Makalah disajikan dalam AICIS 2012, di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera.
- Wahyono, S. Bayu. (2012) Mengkaji Fenomena Pendidikan Persekolahan dari Perspektif Sosiologi Kritis. *Jurnal Dinamika Pendidikan FIP UNY*.